

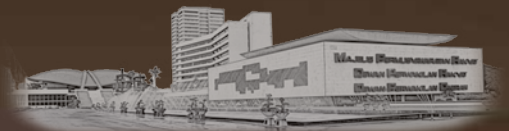


BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR: 865/VI/2015

1/JUNI 2015



DPR Kritisi RAPBN 2016 Agar Tak Bebani Pemerintah

Jangan lewatkan info DPR terkini dan live streaming TV Parlemen di www.dpr.go.id

DPR Kritisi RAPBN 2016 Agar Tak Bebani Pemerintah



Jubir Fraksi Partai Golkar Dewi Asmara menyerahkan Pandangan Fraksinya kepada Pimpinan DPR RI

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengkritisi usulan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal tahun 2016, pada rapat paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Selasa (26/05). Pemerintah telah menyampaikan pengantar dan keterangan pemerintah, pekan sebelumnya.

Sepuluh fraksi yang ada di DPR RI menyampaikan pandangan umumnya terhadap draft awal RAPBN 2016 ini. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Bidang Ekonomi dan Keuangan Taufik Kurniawan, dengan didampingi Pimpinan DPR RI lainnya, yakni Fadli Zon, Fahri Hamzah, dan Agus Hermanto.

Ditemui usai rapat, Taufik mengatakan pandangan fraksi sangat bervariasi. Namun, pandangan itu utamanya kritisi dari DPR agar tidak

memberatkan pemerintah, sekaligus bentuk dukungan DPR atas kebijakan-kebijakan pemerintah.

“Pada prinsipnya, DPR mendukung kebijakan pemerintah terkait apa yang menjadi program prioritas pemerintah. Program-program prioritas pemerintah yang sekarang ini barangkali bisa dimasukkan dalam RAPBN 2016. Pengkritisan dari fraksi-fraksi tersebut konteksnya adalah jangan sampai itu semua malah menjadi beban buat pemerintah, karena sepanjang itu untuk pro kerakyatan dan kesejahteraan bangsa itu pasti akan didukung DPR,” jelas Taufik.

Politisi F-PAN ini menambahkan, pandangan umum dari 10 fraksi ini akan menjadi salah satu bahan pertimbangan pada saat pembahasan dengan Badan Anggaran (Banggar)

dan Alat Kelengkapan DPR. Taufik menegaskan, pandangan fraksi yang beragam itu bukan untuk menghambat pemerintah.

“Jika ada *adjustment* (penyesuaian), itu lumrah. Tidak ada asumsi yang mutlak, pasti ada toleransi plus minus. Pandangan dari fraksi terhadap asumsi-asumsi makro sangat bervariasi. Ada yang mengkritisi, ada yang menilai over optimistis, bahkan *over-estimate*. Tapi sekali lagi tujuannya bukan untuk menghambat. DPR akan mencari seperti apa jalan terbaiknya,” imbuh Politisi asal Dapil Jawa Tengah VII ini.

Taufik mengatakan, pandangan fraksi ini akan menjadi pijakan pemerintah dalam memberikan jawaban, yang akan disampaikan pada rapat paripurna, Kamis (28/05). Kemudian, akan dimulai proses pembahasan di



Banggar dan komisi-komisi DPR.

Sebelumnya, pemerintah sudah menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal, pada Rabu (20/5). Pemerintah memperkirakan, pertumbuhan ekonomi tahun depan berada di angka 5,8-6,2 persen. Adapun laju inflasi berada pada kisaran 4 persen plus-minus 1 persen, nilai tukar rupiah Rp 12.800-13.200 per US\$, dan suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) diperkirakan 4-6 persen. Harga minyak mentah Indonesia (ICP) pada 2016 rata-rata US\$ 60-80 per barel. *Lifting* minyak dan gas bumi mencapai 1,930-2,050 juta barel setara minyak per hari, terdiri dari minyak bumi 830-850 ribu barel per hari dan gas bumi 1,1-1,2 juta barel setara minyak per hari.

Fraksi DPR menanggapi secara beragam terhadap asumsi makro RAPBN 2016 ini. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDI-Perjuangan) mengapresiasi rencana pemerintah atas target pertumbuhan ekonomi tahun depan sebesar 5,8-6,2 persen, dinilai moderat dan rasional.

Juru bicara FPDI-Perjuangan Daniel Lumban Tobing memaparkan, kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang disusun pemerintah harus menjelaskan maksud dan tujuan pembangunan, percepatan infrastruktur, serta pembangunan sosial yang berkualitas. Terkait inflasi yang diproyeksikan berada di kisaran 3,0-5,0 persen, Daniel menyebut angka tersebut harus didukung oleh

keselarasan kebijakan fiskal, moneter dan sektor riil.

Hal senada disampaikan oleh Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) yang menganggap bahwa asumsi makro RAPBN 2016 cenderung moderat. Khusus untuk pertumbuhan ekonomi, jubiir FPKB, Cucun Ahmad Syamsurijal menilai angka 5,8-6,2 persen cukup konservatif dan terbilang *over-estimate*, tetapi kisaran tersebut masih dapat dicapai.

Adapun Fraksi Partai NasDem mengatakan bahwa asumsi makro RAPBN 2016 menunjukkan optimisme yang tinggi sehingga butuh kerja keras dan kekompakan seluruh komponen bangsa untuk mencapainya. Jubiir F-Nasdem, Johnny G. Plate juga meminta adanya penambahan anggaran pada peningkatan dan perbaikan infrastruktur.

Pandangan berbeda datang dari Fraksi Partai Golkar (FPG). Dengan optimisme pertumbuhan ekonomi global serta melihat upaya pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi dan membangun infrastruktur. FPG berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi yang diusulkan pemerintah sebesar 5,8-6,2 persen masih dapat ditingkatkan lagi. "FPG memberikan catatan agar target pertumbuhan ekonomi harusnya dapat lebih optimis, yaitu 6-6,5 persen," kata jubiir FPG, Dewi Asmara.

Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) memprediksi pertumbuhan ekonomi global tahun depan masih

cenderung melambat sehingga asumsi makro yang disampaikan pemerintah dianggap terlalu optimistis, apalagi setelah melihat pertumbuhan ekonomi triwulan pertama 2015 yang hanya 4,7 persen. Jubiir FPAN, A. Riski Sadig menyatakan bahwa pihaknya meminta pemerintah untuk melihat kembali target pertumbuhan tersebut, mengingat terjadinya perlambatan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2011 hingga 2014.

Begitu pula dengan Fraksi Partai Gerindra (F Gerindra) yang berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi paling realistis pada 2016 adalah pada kisaran 5,5 persen. Melalui jubiirnya, Willgo Zainar, F-Gerindra meminta agar RAPBN 2016 dapat mengurangi kesenjangan pembangunan antara perkotaan dan pedesaan.

Selain soal laju pertumbuhan ekonomi, fraksi-fraksi DPR RI juga mengkritisi asumsi makro lainnya, meliputi inflasi, nilai tukar rupiah, suku bunga, harga minyak mentah Indonesia, dan target *lifting* migas. *Lifting* migas dianggap perlu dioptimalkan karena akan berpengaruh pada penerimaan negara dan kebijakan harga bahan bakar minyak di dalam negeri. Sebagian fraksi juga meminta pemerintah meningkatkan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara. Kurs rupiah terhadap dolar AS juga perlu dicermati, karena terkait dengan beban belanja negara. (sf) foto: andri/parle/hr

Fahri Hamzah Akan Bantu Pencairan Anggaran MUI



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah bersilaturahmi dengan pengurus Majelis Ulama Indonesia

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengunjungi dan bersilaturahmi dengan pengurus Majelis Ulama Indonesia. Silaturahmi ini membicarakan masalah alokasi anggaran yang belum cair dari pemerintah untuk MUI.

"Pemerintah berjanji untuk memberikan alokasi dana untuk kegiatan MUI. Sekarang rupanya itu tak diteruskan. Sementara dalam undang-undang, MUI itu diberikan kewenangan dan tugas oleh negara," kata Fahri usai pertemuan di lantai 2, Gedung MUI, Jakarta, Jumat (22/5).

Sejumlah Pengurus MUI yang menemui Fahri antara lain Ketua MUI Slamet Effendi Yussuf, Wakil Ketua Umum Ma'ruf Amin, Sekjen Ichwan Sam, Wakil Sekjen Natsir Zubaidi, dan Ketua Anwar Abbas.

Fahri mengatakan peran tugas MUI seperti memberikan fatwa serta instrumen syariah memerlukan anggaran un-

tuk melakukan riset. Sebagai eksekutif, pemerintah menurutnya perlu memperhatikan persoalan ini.

“Kok tugasnya dikasih, tapi ongkosnya *enggak* dikasih. Kan begitu. Itu yang namanya riset perlu anggaran,” ujarnya.

Sebagai pimpinan DPR bidang Kesejahteraan Rakyat, Fahri berjanji akan mengupayakan komunikasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Agama terkait persoalan ini. Begitupun akan membicarakan dengan Presiden serta Wakil Presiden.

Ia mengingatkan Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 yang mencantumkan adanya alokasi anggaran untuk aktivitas MUI. “Di sini, presiden kan sudah mencantumkan

pos anggaran untuk MUI. Jadi, hal-hal ini kami berharap komunikasi dengan pemerintah, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama. Juga dengan presiden dan wakil presiden,” katanya.

Sementara, Ketua MUI Slamet Effendi Yussuf mengakui masalah anggaran memang menjadi pembicaraan dengan Fahri Hamzah. Ia berharap sebagai legislatif, DPR bisa membantu persoalan anggaran ini.

“Kita minta agar supaya lebih diperhatikan karena dalam 2 tahun ini anggaran MUI seperti tidak jelas oleh karena ada nomenklatur penghapusan tentang bantuan sosial. Anggaran MUI dianggap sebagai bantuan sosial,” ungkapnya. (as) foto: andri/parle/hr

DPR Bahas Peningkatan Kerjasama dengan Rusia



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerima Dubes Rusia Mikhail Yurievich Galuzin

Duta Besar Rusia Mikhail Yurievich Galuzin berkesempatan menemui Wakil Ketua DPR Fadli Zon untuk membicarakan peningkatan kerjasama antara Rusia dan Indonesia diberbagai bidang termasuk hubungan antar parlemen.

“Kedatangan Dubes Rusia kali ini, dalam rangka untuk menjalin satu komunikasi antar kedua negara, menjajaki hubungan antar parlemen, sekaligus menjembatani hubungan kedua negara yang selama ini sudah terjalin dengan baik,” kata Fadli Zon dihadapan wartawan, di DPR, Kamis, (22/5).

Dalam pertemuan tersebut, dibicarakan pula mengenai rencana in-

vestasi Rusia yang akan ditanamkan di Indonesia di segala bidang. Salah satunya di bidang infrastruktur, seperti pembangunan jalan kereta api di Kalimantan.

“Kalau tidak salah, Rusia ingin membangun jalan kereta api yang menghubungkan seluruh Kalimantan untuk keperluan batubara maupun keperluan umum lainnya, dan pada intinya dalam pertemuan tersebut, mereka ingin lebih banyak meningkatkan investasinya di Indonesia,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Fadli Zon juga mengajak Dubes Rusia untuk mengunjungi Pameran Keris Nusantara yang tengah berlangsung di DPR.

Menurut Fadli Zon Dubes Rusia Mikhail Yurievich Galuzin sangat apresiasi dengan hasil-hasil budaya Indonesia yang sangat tinggi, bahkan suatu saat nanti ingin menjajaki adanya pameran keris di Rusia.

Sementara itu, Dubes Rusia Mikhail Yurievich Galuzin menjelaskan bahwa dirinya setuju dengan yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon.

“Saya sangat setuju dan mendukung apa yang Bapak Fadli Zon sampaikan, terutama hubungan antar parlemen diantara kedua negara ini. Tanpa dukungan hukum yang diberikan parlemen, kerjasama yang baik tidak mungkin terjadi,” ujar Mikhail.

Oleh karena itu, terangnya, pihak kami (Rusia-red) sangat berharap kerjasama antar parlemen akan terus berkembang salah satunya melalui pertukaran kunjungan antara Ketua Parlemen Rusia dan Kunjungan Ketua Parlemen Indonesia.

Mengenai kerjasama di bidang militer, Mikhail menerangkan, kerja sama ini telah berlangsung cukup lama dan sangat baik. Banyak alutsista buatan Rusia yang digunakan TNI dengan sangat baik dan bermafaat. “Untuk itu pihak kami bersedia untuk terus mengembangkan secara aktif kerja sama dengan Indonesia,” tegasnya.

(nt) foto denus/parle/hr

Pansel Harus Teliti Rekam Jejak Calon Pimpinan KPK

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengingatkan Pansel Pimpinan KPK jangan salah lagi memilih Pimpinan KPK. Sudah dua kali Pansel memilih Pimpinan KPK tidak pernah tuntas dan selesai dan berujung pada masalah pidana. Karena itu Pansel harus betul-betul meneliti rekam jejak orang-orang yang akan dipilih menjadi Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi.

Fadli mengemukakan hal itu kepada pers Kamis (21/5) siang di Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Menanggapi ditetapkannya 9 Srikandi Pansel KPK, ia menilai pasti ada kelemahan dan juga pasti ada kelebihannya.

Untuk itu dia berharap, kesembilan srikandi nanti dalam memilih Pimpinan KPK harus menghilangkan kepentingan dan ambisi-ambisi pribadi. Apalagi ambisi-ambisi politik kekuasaan karena itu akan menjerat mereka sendiri, dan akan menjadi batu sandungan buat mereka juga.

Dari ke 9 nama yang diusulkan Pansel KPK antara lain Desy Damayanti, Ahli Ekonomi Keuangan dan Moneter yang didaulat menjadi Ketua Pansel. Anggotanya adalah, Pakar Hukum Tata Negara Enny Nurbaningsih, Pakar Hukum Pidana Harkristuti Harkrisnowo, Ahli Informasi Teknologi dan Manajemen Betti S Alisyahbana Pakar Hukum Pidana Ekonomi dan Pencucian Uang Yenty Ganarsih.

Selanjutnya, Ahli Psikologi Sumber Daya Manusia dan Pendidikan Supra Wimbari, Ahli Tata Negara Pemerintahan Natalia Subagya, Ahli Sosiologi Korupsi dan Modal Sosial



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon

Meuthia Genie Rochman, dan Ahli Hukum Diani Sedyowati. Dalam pertimbangan untuk mengangkat 9 srikandi ini memang lain dari pada yang lain, yang lalu Pansel Pimpinan KPK adalah laki-laki dan sekarang semuanya wanita. (spy) foto: naefuroji/parle/hr

Tidak Ada Urgensinya Usulkan RUU KKR



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon Audensi dengan Sekretariat Bersama Center For Indonesia Communities Studies (CICS), Kaukus Raden Saleh, dan YKCB

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyatakan, Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) pernah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK) artinya secara hukum keputusan

MK tersebut adalah sebuah keputusan yang final dan mengikat.

Dilihat dari sisi sosial politik juga tidak ada urgensinya keberadaan UU KKR itu sendiri, justru malah bisa menimbulkan

potensi konflik baru.

Demikian dikatakan wakil Ketua DPR Bidang Korpolkam Fadli Zon, saat Audensi dengan Sekretariat Bersama-Center For Indonesia Communities Studies (CICS), Kaukus Raden Saleh, dan YKCB di ruang kerjanya lantai 3 Gedung Nusantara 3 DPR Kamis (21/4) sore.

Karena itu, lanjut Fadli Zon, kehadiran delegasi CSIS dan YKCB ini menjadi sangat penting, apalagi disertai petisi dari tokoh-tokoh masyarakat. "Ini akan disampaikan ke semua Fraksi di DPR yang isinya tentang penolakan RUU KKR jilid 2 dengan sejumlah alasan," ujarnya.

Petisi tersebut kata Fadli, juga diberikan kepada Pemerintah sebagai inisiatif UU KKR melalui Menteri Hukum dan HAM. Hal itu akan menjadi lebih kuat dalam penolakan pembahasan RUU tersebut.

Kedatangan sejumlah tokoh tersebut adalah untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran untuk menolak RUU KKR, karena RUU KKR jilid 2 ini adalah merupakan alat kepentingan dari kalangan eks PKI untuk mendapatkan

rehabilitasi, kompensasi dan lain-lain.

“RUU ini jika dibahas kemudian disahkan, dapat menimbulkan konflik. Undang-Undang KKR pada masa periode yang lalu sudah pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Padahal keputusan MK adalah keputusan yang final dan mengikat, sehingga inisiatif

Pemerintah untuk mengajukan UU KKR baru ini dibalang aneh dan kurang masuk akal,” tegas Fadli Zon.

Ditegaskan kembali bahwa usulan tersebut tidak ada urgensinya, sedangkan proses rekonsiliasi sebaiknya terjadi secara natural atau alamiah saja tidak dibuat-buat. “Kalau dibuat-buat

malah bisa menimbulkan konflik baru. Tadinya lukanya sudah sembuh nanti akan terluka lagi yang akan membuat luka baru dan dapat menimbulkan konflik baru,” terang dia. *(spy,mp) foto: naefuroji/parle/hr*

DPR Apresiasi Optimisme Menkeu



Ketua Komisi XI DPR Fadel Muhammad

Komisi XI DPR mengapresiasi optimisme Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro menghadapi perkembangan ekonomi di kuartal kedua tahun 2015, maupun di tahun mendatang. Komisi XI sangat mendukung semangat dari Menkeu ini.

Demikian disampaikan Ketua Komisi XI DPR Fadel Muhammad di sela-sela rapat kerja antara Komisi XI dengan Menkeu dan jajaran di ruang rapat Komisi XI, Gedung Nusantara I, Rabu (27/05/15).

“Saya kira Menkeu sangat optimis, meskipun perkembangan ekonomi dunia sedang menurun, tapi kepercayaan diri Indonesia semakin bagus. Menkeu sangat optimis dengan keadaan sekarang. Mudah-mudahan tercapai. Kita dukung sepenuhnya,” yakin Fadel.

Namun, tambah Politisi F-Golkar ini, pihaknya tetap mengingatkan pertumbuhan ekonomi di beberapa wilayah Indonesia yang belum merata. Termasuk penerimaan negara yang belum maksimal. Ia mendorong Menkeu untuk dapat mencapai target penerimaan negara, termasuk dari sektor pajak.

“Penerimaan dari sektor pajak memang belum tercapai. Namun kita sudah mendengar langkah dan terobosan yang dibuat oleh Dirjen Pajak. Kita menganjurkan ada langkah

menggunakan teknologi lebih tinggi, agar PPN itu rekonsiliasi, dan pajak-pajak daerah dikendalikan. Kita berikan dorongan dan dukungan agar semua tercapai,” tambah Politisi asal Dapil Gorontalo ini.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan ini juga mengkritisi masalah penyerapan anggaran di kuartal I yang masih minim. Namun ia yakin, Menkeu dapat memaksimalkan di periode-periode berikutnya.

Sebelumnya, Menkeu Bambang menyampaikan realisasi APBN Perubahan 2015 sampai dengan Jumat (22/5) pekan lalu.

“Pendapatan negara yang sudah masuk sebesar Rp 508,6 triliun atau 28,9 persen dari APBN Perubahan 2015. Pendapatan negara turun dibanding periode sama tahun lalu yang membukukan penerimaan hingga Rp 542,6 triliun,” jelas Bambang.

Salah satu penyebab utamanya adalah menurunnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) minyak dan gas bumi (migas), lantaran harga minyak sudah jatuh jauh dibanding tahun 2014.

“PNBP migas sampai 22 Mei 2015 mencapai Rp 91,6 triliun atau 34 persen dari target. Sedangkan tahun lalu, pada periode sama mencapai Rp 119,9 triliun, ini saat harga minyak masih tinggi,” imbuh Bambang.

Berikutnya, penerimaan perpajakan terkumpul sebesar Rp 416,8 triliun atau 28 persen dari target. Realisasi penerimaan perpajakan juga lebih rendah dibanding periode sama tahun lalu yang sebesar Rp 422,2 triliun atau 33,9 persen dari APBNP. Dari sisi belanja, total belanja hingga 22 Mei 2015 sebesar Rp 552,5 triliun atau 27,8 persen dari APBN Perubahan 2015.

Bambang menjelaskan, belanja yang dikeluarkan terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 310,8 triliun yang terbagi untuk belanja K/L sebesar Rp 138,3 triliun dan belanja non K/L sebesar Rp 172,5 triliun.

“Belanja K/L ada keterlambatan, salah satunya karena APBNP baru disepakati pertengahan Februari. DIPA cair baru pertengahan Maret, dan ada perubahan nomenklatur utamanya Kemendikbud, sehingga pencairan baru bisa akhir April,” jelas Bambang.

Sementara itu, realisasi transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 241,7 triliun atau 36,4 persen dari pagu di APBN Perubahan 2015. Dengan realisasi pendapatan dan belanja tersebut maka defisit anggaran per 22 Mei 2015 sebesar Rp 43,9 triliun atau 0,38 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

“Pembiayaan yang didapat sebesar Rp 143,8 triliun. Jadi, intinya masih ada *cash flow* yang cukup besar untuk dibelanjakan lebih lanjut oleh K/L,” kata Bambang. *(sf) foto: naefuroji/parle/hr*

Penurunan Signifikan BPIH 2015 Atas Desakan DPR

Ketua Komisi VIII Saleh Partaonan Daulay menyangkan pernyataan Presiden Jokowi saat mengumumkan penurunan BPIH (biaya perjalanan ibadah haji) 2015, Rabu (27/5) kemarin yang seolah-olah menerangkan bahwa penurunan BPIH 2015 hanya kerja sepihak dari Kementerian Agama.

“Faktanya, Komisi VIII DPR memiliki bukti bahwa besaran penurunan yang diusulkan oleh pemerintah hanya 26 Dolar Amerika. Berkat kerja keras DPR yang menyisir seluruh komponen BPIH, akhirnya diperoleh efisiensi yang cukup besar hingga 502 Dolar Amerika,” tegas Saleh.

Sejatinya dijelaskan Saleh, DPR tidak begitu mempermasalahkan jika pemerintah mengklaim penurunan itu berkat kerja pemerintah secara sepihak. Apalagi, orientasi DPR dalam menurunkan BPIH bukanlah untuk mencari nama.

Melainkan ingin memperbaiki tata kelola penyelenggaraan haji Indonesia, yang dapat dimulai dengan penurunan BPIH dan pengawasan terhadap kualitas pelayanan haji.

Namun Saleh khawatir, klaim sepihak dari pemerintah ini akan menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa DPR khususnya Komisi VIII tidak memikirkan rakyat. Oleh karena itu ia kembali menegaskan bahwa penurunan BPIH yang sangat signifikan itu adalah atas kerja keras DPR. Bahkan bisa dikatakan, tanpa campur tangan dan desakan dari DPR penurunan BPIH itu hanya sebesar 26 Dolar Amerika.

“Mungkin ketika menghadap presiden, Menag hanya menceritakan soal penurunan dan efisiensi yang dilakukan oleh Kemenag. Bisa saja beliau lupa menyebut bahwa pembahasan BPIH itu dilakukan bersama-sama



Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay

DPR,” tambah Politisi dari Fraksi PAN ini.

Meski demikian Saleh juga mengapresiasi penandatanganan Perpres No.64 Tahun 2015, walau sedikit terlambat dari waktu yang dijanjikan Menteri Agama. Dengan adanya keputusan resmi dari pemerintah tersebut, maka seluruh jemaah haji dapat segera melunasi sisa pembayaran BPIH-nya.

(Ayu) foto: andri/parle/hr

Komisi VI Dukung Pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung



Wakil Ketua Komisi VI DPR Heri Gunawan dan M. Farid Al Fauzi

Rencana PT Pelindo I yang ingin mengembangkan Pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatera Utara, mendapat dukungan dari Komisi VI DPR RI. Pelindo I sendiri akan mensinergikan proyek pengembangan ini dengan BUMN lainnya.

Demikian bunyi salah satu kesimpulan rapat antara Komisi VI dengan Deputi BUMN dan Direktur Utama Pelindo I, Rabu (27/5). Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi VI M. Farid

Al Fauzi. Hadir pula mendampingi Farid, dalam rapat tersebut Wakil Ketua Komisi VI Heri Gunawan.

Dalam penjelasannya, Dirut Pelindo I Bambang Eka Cahyana, menjelaskan, kelak Kuala Tanjung akan dijadikan pelabuhan yang terintegrasi antara terminal *multi purposes*, kawasan industri, pengembangan terminal peti kemas, dan pengembangan kawasan residensial. Pelindo I sudah menginvestasikan anggaran sebesar 400 juta dolar AS atau Rp4,8 triliun untuk pembangunan tahap pertama.

Jadi, tidak sekadar pelabuhan, Kuala Tanjung akan menjadi kawasan industri, kawasan perumahan, dan kawasan penunjang industri. Pengembangan pelabuhan ini akan dilakukan dalam empat tahap. Tahap I dan II diperkirakan rampung pada 2018. Dukungan dari Komisi VI sangat wajar, lantaran pelabuhan ini bisa menjadi bagian dari masa depan Indonesia.

Farid di akhir rapat juga menyampaikan bahwa masalah ini akan dibincang lebih dalam dengan Menteri BUMN saat rapat kerja nanti. Pada bagian lain, Pimpinan Komisi VI juga meminta Kementerian BUMN untuk melakukan upaya hukum untuk penyelamatan aset-aset PT Pelindo.

“Komisi VI DPR RI meminta kepada Dirut PT Pelindo I untuk menyampaikan rencana bisnis atau pengembangan pelabuhan di seluruh wilayah kerja PT Pelindo I,” kata Farid saat menutup rapat. (mh) foto: iwan armanias/parle/hr

Komisi VII DPR Pertanyakan Keabsahan Pelantikan Dirjen Migas

Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PPP Joko Purwanto mempertanyakan keabsahan pelantikan eselon I Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), hingga akhirnya Dirjen Migas Kementerian ESDM IGN Wiratmaja Pija keluar dari Rapat yang sedianya beragendakan RDP dengan Dirjen Migas ESDM dan PT Pertamina (Persero).

“Pak Wirat sudah keluar belum Kepresnya itu?” kata Joko, saat RDP di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu Sore, (27/5).

Wirat pun langsung mengkonfirmasi hal tersebut hingga akhirnya Rapat diskors selama lima menit untuk memberikan waktu Wirat untuk mencari tahu nomor Kepres pelantikan beliau.



Anggota Komisi VII DPR Joko Purwanto

Pada kesempatan itu, Wirat mengatakan, Kepres pengangkatan saya sebagai Dirjen Migas harus menghadap Pak Menteri (ESDM) untuk diambil.

Karena tidak bisa menyebutkan nomor Kepresnya, akhirnya Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika meminta persetujuan anggota DPR lainnya untuk mengizinkan Wirat keluar meninggalkan Rapat.

“Setuju Pak Wirat meninggalkan rapat?,” tanya Kardaya. Kemudian dijawab setuju oleh seluruh peserta rapat. “Setuju!,” jawab peserta rapat. Setelah mendapat persetujuan meninggalkan ruang rapat, Wirat bersama rombongannya meninggalkan Gedung DPR. (si) foto: supri/parle/hr

Komisi III DPR Desak BNPT Berantas Terorisme Sesuai Prinsip HAM

Anggota Komisi III DPR Djazuli Djuaweni dari Fraksi PKS mengatakan, kelompok radikal terorisme seharusnya sudah hilang dari Indonesia. Pasalnya, terorisme bukan hanya musuh negara tetapi musuh kita semuanya.

“Terorisme ini sesungguhnya anti kemanusiaan, terorisme ini tidak mempunyai ideologi, mereka hanya bisa membikin kekacauan saja, kalau disebut dengan dalih agama, agama mana yang mengajarkan teror, tidak ada satupun agama yang diakui di Indonesia yang mengajarkan tentang teror,” jelasnya saat RDP dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Saud Usman Nasution. Rapat dipimpin Ketua Komisi III DPR Azis Syamsudin di ruang rapat Komisi III Rabu (27/4) sore.

Dia mencontohkan, selama ini agama Islam selalu diidentikkan dengan kekerasan, padahal dari simbol salam mengandung pengertian semoga diberikan keselamatan, perdamaian dan kesejahteraan. “Secara tekstual juga jelas jangankan musuh, memaksa orang untuk memeluk beragama Islam saja tidak boleh, karena memeluk agama sebagai keyakinan yang tidak bisa dipaksakan,” jelasnya.

Komisi III DPR, lanjutnya, mendesak

Kepala BNPT agar dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam pencegahan dan pemberantasan terorisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengedepankan prinsip-prinsip Hak Azasi Manusia dan menciptakan stabilitas keamanan di masyarakat.

Sementara itu, Kepala BNPT Saud Usman Nasution mengatakan, bahwa memberantas tindak pidana terorisme sesungguhnya memerangi ideologi radikal terorisme.

Karena itu, lanjut Saud kehadiran program BNPT banyak menitik beratkan pada pendekatan lunak dan persuasif atau dalam hal ini upaya pencegahan paham dan ajaran radikal terorisme.

Saud menambahkan, dalam melaksanakan upaya pencegahan tersebut, BNPT telah merumuskan dan menggunakan dua strategi, diantaranya strategi kontak radikalisme yakni melakukan upaya pencegahan dan penangkalan penyebaran paham radikal terorisme di tengah masyarakat melalui kegiatan kontra propaganda, pengawasan, peningkatan kewaspadaan dan perlindungan.

Sasaran dari strategi ini adalah kelompok pendukung, simpatisan dan ma-



Anggota Komisi III DPR Djazuli Djuaweni

sarakat dengan tujuan meningkatkan daya tangkal masyarakat dari pengaruh penyebaran paham terorisme. Radikalisme yakni melakukan upaya pembinaan dan penyadaran kepada perorangan maupun kelompok radikal terorisme.

Dia mengemukakan, hasil pelaksanaan pencegahan terorisme selama ini telah cukup berhasil dengan indikator meningkatnya peran serta masyarakat terhadap upaya pencegahan terorisme yang dilakukan oleh BNPT baik dari tokoh agama, tokoh adat, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, perguruan tinggi, pesantren, media massa dan komunitas media online. (Spy)

foto: andri/parle/hr



Panja RUU Disabilitas Himpun Masukan



Ketua Panja RUU Penyandang Disabilitas Fathan

Panja RUU Penyandang Disabilitas Komisi VIII DPR RI menilai perlu ada kuota khusus bagi penyandang disabilitas di seluruh sektor lapangan kerja.

Hal tersebut menjadi salah satu kesimpulan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Sekretaris Dirjen

Rehabilitasi Sosial dan Kepala Diklat dan Penelitian Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI, Rabu (27/5) di Senayan Jakarta.

“Banyak masukan yang mengemuka dalam RDP hari ini terkait dengan RUU Penyandang disabilitas. Salah satunya tentang hak dari penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan dan berkariir sesuai dengan kemampuan dan kualitasnya, termasuk juga di bidang politik. Selama ini dapat dikatakan hak tersebut terabaikan, sehingga tidak sedikit penyandang disabilitas yang tidak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kemampuan, kualitas dan *background* ilmu yang dimilikinya,” jelas Ketua Panja RUU Penyandang Disabilitas, Fathan yang memimpin rapat tersebut.

Selain itu, menurut Fathan selama ini peran dan perhatian Pemerintah daerah terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas masih sangat kurang. Pemda lebih mengandalkan kepada

pemerintah pusat. Padahal, Pemda memiliki peranan penting untuk mengampanyekan atau menyebarluaskan kesadaran dan kepedulian atas hak-hak penyandang disabilitas. Misalnya dengan penyediaan fasilitas umum khusus untuk penyandang disabilitas.

Bahkan, pada kesempatan itu Sekretaris Dirjen Rehasos, Bambang juga memberi masukan pembentukan penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) penyandang disabilitas yang terarah dan terukur.

Tidak hanya itu, pada kesempatan itu juga mengemuka usulan pemberian sanksi yang layak bagi para penjahat atau pelanggar HAM (Hak asasi manusia) di bidang disabilitas. “Kami berharap RUU penyandang disabilitas ini juga harus mampu mendorong perubahan *mindset* orangtua, bagaimana seharusnya mengasuh dan memperlakukan penyandang disabilitas. Kami juga berharap RUU ini harus dipublikasikan secara luas agar mendapat masukan dari masyarakat, sehingga terbentuk Undang-undang yang bisa mengakomodir seluruh hak dan kewajiban terhadap penyandang disabilitas,” tegas Fathan. (Ayu) foto: andri/parle/hr

DPR Harapkan Menpora Hormati Putusan PTUN

Komisi X DPR meminta agar Menpora Imam Nahrawi menghormati putusan sela yang ditetapkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta Timur, awal pekan ini, Senin (25/05/15).

Demikian diungkapkan Ketua Komisi X DPR Teuku Riefky Harsya usai Rapat Dengar Pendapat Umum dengan PSSI, PT Liga Indonesia, Perwakilan Liga Nusantara dan Divisi Utama di Gedung Nusantara I, Selasa (26/05) malam.

“Saran dari kami, jelas. Menpora harus menghormati dan melaksanakan hasil penetapan PTUN Jakarta. Kami berharap agar pemerintah, termasuk Kemenpora jangan sampai mengintervensi terlalu jauh sehingga menimbulkan keaduan politik. Jangan sampai kondisi sepakbola nasional mundur. Intinya, kami tak berharap sanksi FIFA turun,” kata Teuku usai RDPU.

Diketahui bahwa, PTUN memutuskan bahwa tuntutan yang diajukan

oleh kuasa hukum PSSI dikabulkan oleh PTUN. Dalam gugatannya, PSSI menuntut pembatalan dan pencabutan SK Menpora karena menganggap pihak Kemenpora menyalahi Undang Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, KUH Perdata, dan PP Nomor 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga.

Indonesia memiliki waktu sekitar tiga hari, atau batas waktu 29 Mei mendatang untuk menyelesaikan masalah sepakbola nasional. Sedianya, usai menggelar RDPU dengan PSSI, Komisi X akan menggelar rapat kerja dengan Menpora Imam Nahrawi. Namun, raker dipastikan batal, karena Menpora masih sibuk dengan kegiatan terkait SEA Games 2015.

“Kita semua berharap, agar DPR segera melakukan langkah strategis, baik langsung kepada Menpora, ataupun melalui Pimpinan DPR kepada



Ketua Komisi X DPR Teuku Riefky Harsya

Presiden, agar sanksi FIFA ini jangan sampai terjadi. Sepakbola Indonesia perlu kita selamatkan dalam 2 hari mendatang,” tegas Riefky.

Politisi F-PD ini pun sekali lagi mengemukakan, dampak dari sanksi FIFA akan sangat luar biasa. Bukan hanya terhadap sepakbola Indonesia, tapi juga dampak sosial. Untuk itu, ia berjanji akan segera melaporkan hasil pertemuan ini kepada Pimpinan DPR.

“Mengingat tiga hari yang tersisa ini merupakan waktu yang kritis bagi sepakbola Indonesia, maka kami akan segera melaporkan hal ini kepada Pimpinan DPR, untuk mengambil langkah strategis bagi persepakbolaan Indonesia. Kami akan meminta saran dari para petinggi, Ketua DPR atau Presiden. Tentunya, sebelum 29 Mei 2015 karena itu batas waktu dari FIFA,”

imbuah Politisi asal Dapil Aceh I ini.

RDPU juga menghasilkan beberapa catatan, diantaranya, berkaitan dengan insiden pembatalan pertandingan antara Pahang FA, Malaysia, dengan Persipura Jayapura, Indonesia, dalam AFC Cup 2015, PSSI meminta agar keberadaan BOPI ditinjau ulang karena tak sesuai dengan UU No.3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolah-

raga Nasional dan telah menghambat keluarnya rekomendasi izin pemain asing dan tim asing yang akan bertanding di Indonesia.

“Seluruh penjelasan PSSI, PT Liga Indonesia, perwakilan klub dalam RDPU ini akan dijadikan bahan dan pertimbangan utama dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menpora,” tutup Riefky. (sf) foto: naefuroji/parle/hr

Terlantarnya Jamaah Umroh, Tamparan Bagi Travel dan Kemenag



Anggota Komisi VIII DPR Muhammad Syafi'i

Terlantarnya sejumlah jamaah umroh asal Indonesia di sebuah hotel Mekah dinilai anggota Komisi VIII DPR Muhammad Syafi'i, bukan hanya tamparan bagi travel yang memberangkatkan jamaah umroh tersebut, melainkan juga tamparan bagi Pemerintah Indonesia. Khususnya Kemenag yang masih memberikan izin kepada travel-travel nakal.

Ditemui Parlemen di Gedung DPR, Rabu (27/5) politisi Partai Gerindra ini mengatakan Komisi VIII DPR akan memanggil Kemenag untuk diminta keterangan dan mempertanggungjawabkan kenapa masih ada travel nakal yang memiliki izin sehingga penantaran jamaah masih berlangsung sampai hari ini.

Sebagaimana diberitakan, sebanyak 113 orang asal

Merangin, Jambi yang melaksanakan ibadah umroh terlanter di Mekah. Mereka belum bisa pulang ke tanah air, padahal visa umroh mereka akan habis pada 4 Juni mendarang. Kepada para jamaah umroh tersebut, pihak hotel tempat jamaah umroh menginap telah memberikan ultimatum. Pengelola hotel memberi batas waktu hingga awal Juni untuk meninggalkan hotel. Atas inisiatif pemerintah akhirnya mereka telah berhasil dipulangkan ke tanah air.

Saat ditanya kapan pemanggilan Menag, Syafi'i mengatakan Komisi VIII saat ini masih ada tugas pada Panja Haji dan Umroh karena itu akan membahas langsung eksekusi dalam bentuk regulasinya supaya kejadian seperti ini tidak terulang lagi.

Ditambahkan anggota Dewan yang akrab dipanggil Romo ini, Indonesia adalah negara paling mahal mengeluarkan izin bagi travel yang diperkenankan untuk memberangkatkan haji dan umroh. Namun dia tidak melihat bahwa mahalnya persyaratan yang akan dapat izin benar-benar memiliki kapasitas, kemampuan dan ada jaminan akan mampu melayani, membina dan melindungi jamaah umroh.

“Saya mensinyalir ada hal-hal yang tidak lazim, sehingga banyak travel yang sebenarnya sudah berkali-kali bermasalah tetap saja mendapat izin menyelenggarakan haji dan umroh. Sementara banyak yang memiliki kapasitas, kapabilitas dan persyaratan untuk menyelenggarakan umroh-haji tapi sulit dapat izin pemerintah. Kalau kasus penantaran jamaah umroh atau haji terjadi lagi, ini sangat memalukan,” tandas Romo. (mp) foto: mastur/parle/hr

Perkuat Diplomasi, Tuntaskan Rohingya

Komisi I DPR RI mendukung langkah Kementerian Luar Negeri RI untuk terus memperkuat langkah diplomasi dengan negara lain agar memberikan perhatian kepada permasalahan Rohingya. Hal ini diperlukan karena Indonesia sebagai negara yang menerima pengungsi Rohingya memiliki posisi

sentral di Asean.

“Langkah pemerintah menerima pengungsi Rohingya adalah solusi jangka pendek dalam kondisi kritis, Kemenlu perlu mengupayakan solusi lebih permanen melalui langkah diplomasi dengan negara terkait,” kata anggota Komisi I Irine Yusiana Roba



Anggota Komisi I DPR Irine Yusiana Roba Putri



Putri saat dihubungi di Jakarta, Selasa (26/5).

Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini memberikan apresiasi karena diplomasi yang dibangun dengan Malaysia dan Thailand sejauh ini telah menghasilkan sejumlah langkah nyata. Komisi yang membidangi masalah luar negeri menurutnya akan terus mencermati penanganan persoalan kemanusiaan ini.

Bicara pada kesempatan berbeda Wakil Ketua Komisi I Tantowi Yahya

mengatakan dalam kesempatan berkunjung ke Myanmar beberapa waktu lalu pihaknya telah bertemu dengan anggota parlemen dan Menlu Myanmar. Ia sempat menanyakan soal kemungkinan kembalinya pengungsi Rohingya.

“Mereka mengatakan belum dapat menerima kembali pengungsi Rohingya, mereka tidak mengatakan alasannya apa. Khusus isu ini mereka kelihatannya belum terbuka,” papar

wakil rakyat dari daerah pemilihan DKI Jakarta III ini.

Ia menambahkan diplomasi dengan Myanmar perlu terus diefektifkan berdasarkan Konvensi PBB yang mengatur pembicaraan antara tiga pihak. Pertama Myanmar sebagai negara asal pengungsi, Malaysia dan Thailand sebagai negara transit serta Malaysia dan Australia sebagai negara tujuan. (iky) foto: andri/parle/hr

Komisi IV Dukung Program Cetak Sawah Baru



Ketua Komisi IV DPR Edhi Prabowo berdialog dengan Menteri

Komisi Pertanian DPR RI menerima usulan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengenai realokasi program, yang terdiri dari pergeseran antar program sebesar Rp458,8 milyar, dan di dalam program sebesar Rp

249,21 milyar.

“Komisi IV menerima usulan Kementerian Pertanian mengenai realokasi program sebesar Rp.708,085 Milyar, yang akan digunakan untuk cetak sawah baru, bantuan alat mesin per-

tanian (alsintan), dan percepatan pengembangan bawang merah,” kata Ketua Komisi IV Edhi Prabowo, dalam Raker membahas penyerapan anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2015, Selasa (26/05), di Gedung Parlemen, Jakarta.

Komisi IV menerima penjelasan atas penyerapan anggaran Kementerian Pertanian per tanggal 25 Mei sebesar 16,9% terhadap pagu APBN-P tahun 2015, yang apabila diperhitungkan terhadap pagu APBN-P tahun 2015 adalah sebesar 34,99% terhadap pagu murni tahun 2015.

Komisi IV meminta Pemerintah untuk meningkatkan sosialisasi secara luas kepada masyarakat terhadap peredaran produk pangan yang aman.

Selain itu, ditegaskan Edhi Prabowo, Pemerintah harus melakukan pengawasan dan koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan pangan, serta menindak tegas pelaku pelanggaran di bidang pangan.

“Hal itu harus sesuai amanat Undang-Undang No.18 tahun 2012 tentang Pangan,” jelas politisi Partai Gerindra yang memimpin raker ini. (as) foto: rizka/parle/hr

Soal Beras Plastik, Komisi IV Himbau Masyarakat Tidak Resah

Komisi IV DPR meminta Pemerintah segera menjelaskan kepada masyarakat sesungguhnya yang terjadi terkait beredarnya beras plastik. Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa Daniel Johan, menghimbau kepada masyarakat agar tidak terhasut dan tidak resah dalam menyingkapi isu beredarnya beras plastik, agar tidak terjadi kerawanan sosial.

“Kita tunggu hasil penelitian Polri. Kami menghimbau kepada masyarakat terkait isu ini tidak terhasut, tidak resah, dan harus menjaga kondisi agar tidak terjadi kerawanan

sosial khususnya saat kita memasuki bulan puasa dan Idul Fitri,” kata Daniel, seraya meminta ketegasan, kecermatan dari kepolisian bersama seluruh pihak terkait agar masalah ini sekaligus menjadi bahan pelajaran agar tidak terulang.

Disela Rapat Kerja Komisi IV membahas isu yang terjadi dan belum mereda, yakni beras sintesis, dengan Menteri Pertanian Amran Sulaiman, hadir pula Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Roy Sparingga dan Kepala Perum Bulog Lenny Sugiyat, Selasa (26/05), di Gedung Parlemen,



Suasana rapat Komisi IV DPR

Jakarta.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukannya sebagai anggota Komisi bidang pangan dan pertanian, hampir dapat dipastikan harga plastik jauh lebih mahal daripada harga beras, sehingga kemungkinan faktor ekonomi menjadi tidak relevan.

Menurut Daniel, ada dua kemungkinan lain yang muncul karena adanya kejadian ini, yaitu intrik isu pengalihan isu, namun belum diketahui tujuan pengalihan isu itu. Yang kedua,

dikhawatirkan adanya sabotase terhadap pemerintahan.

“Kita juga tidak paham apa yang disabotase, bisa saja ada upaya sistematis melakukan sabotase atas upaya Indonesia yang sedang bekerja keras untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan, atau bisa juga sabotase untuk membuat masalah sehingga dipandang masalah pangan *gak* beres-beres padahal masalahnya *gak* ada,” ungkapnya.

Selain itu, mungkin juga adanya sabotase terhadap bulog yang sedang gencar-gencarnya menyerap hasil produksi beras petani.

“Sabotase apapun harus kita telusuri dan kita pahami, dari sana kita berusaha untuk mengatur ulang. Karena dengan tercapainya kedaulatan pangan di Indonesia, itu menjadi pukulan untuk pengusaha atau negara lain yang mempunyai kepentingan memasukan (impor) beras ke Indonesia,” jelasnya

Jika hal ini benar-benar terjadi, lanjutnya, maka ini merupakan kritik sekaligus peringatan keras terhadap pemerintah. Oleh karena itu, dia mendorong terbentuknya Panitia Khusus (Pansus) menyingkap hal tersebut.

“F-PKB komisi IV mendorong terbentuknya Panitia Khusus agar hal ini menjadi jelas. Tidak hanya pansus yang menjawab persoalan beras plastik, tetapi kita akan mendorong pansus tata niaga komoditas yang dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga tidak ada lagi keraguan atas produk pangan yang dikonsumsi masyarakat,” tegas Daniel. (as) foto: rizka/parle/hr

SP PLN Mengadu ke Komisi VI



Ketua Komisi VI DPR Achmad Hafisz Tohir saat menerima Serikat Pekerja PLN

Serikat Pekerja (SP) PLN mengadu nasibnya ke Komisi VI DPR RI. Mereka mengaku keberadaannya sebagai karyawan PLN terancam. Status para karyawan semakin tidak jelas, menyusul rencana privatisasi PLN.

Hadir dalam pertemuan dengan Komisi VI itu, Ketua SP PLN, Ketua Dewan Pembina SP PLN, dan beberapa anggota SP PLN. Delegasi diterima

Ketua Komisi VI Achmad Hafisz Tohir dan Wakil Ketua Komisi VI Heri Gunawan. Hadir pula beberapa anggota Komisi VI pada Kamis sore (21/5) itu.

Menurut Ketua Dewan Pembina SP PLN Ahmad Daryoko, isu dan rencana privatisasi listrik Jawa-Bali oleh Direksi PLN betul-betul mengancam para pekerja. Pasalnya, dengan privatisasi itu dipastikan akan terjadi PHK besar-

besaran. Masalah internal di tubuh PLN juga diungkap delegasi SP PLN di hadapan Pimpinan dan para anggota Komisi VI.

Hanya saja Pimpinan dan anggota Komisi VI mengkritik delegasi SP PLN yang minim data, sehingga menyulitkan Komisi VI untuk bersikap dan mengkonfrontasikannya dengan jajaran Direksi PLN. Heri Gunawan berkali-kali pula mengingatkan para delegasi agar memberi data lengkap seputar kecurangan dan isu privatisasi yang dilakukan Direksi.

Delegasi juga membicarakan inefisiensi yang terjadi di PLN. Hanya saja lagi-lagi delegasi tidak membawa data lengkap seputar inefisiensi yang terjadi di lingkungan PLN yang bisa dijadikan bahan rujukan bagi Komisi VI. Darmadi Durianto Anggota Komisi VI (dapil DKI III) mengatakan, inefisiensi di PLN menyulitkan PLN sendiri untuk memproduksi listrik murah bagi rakyat.

“Kata kuncinya adalah inefisiensi telah merendahkan daya saing PLN. Mestinya SP PLN memberi tahu kami, ini yang harus segera dilakukan. Nanti kita konfrontasikan dengan Direksi,” tandas politisi PDI Perjuangan itu. (mh)

foto: naefuroji/parle/hr



Apresiasi Program “Ketuk Pintu” Pemprov DKI

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meluncurkan program “Ketuk Pintu Layani dengan Hati” untuk memberi layanan kesehatan bagi warganya. Program ini sangat diapresiasi, karena Pemprov DKI makin menunjukkan kepeduliannya menyehatkan warga Jakarta.

Apresiasi tersebut disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati (dapil DKI II) sebelum mengikuti Rapat Paripurna DPR, Selasa (26/5). “Bagus sekali, saya apresiasi. Artinya, Pemprov DKI proaktif menjaga dan mengupayakan peningkatan kesehatan warganya,” ujarnya.

Politisi PPP itu berharap, sembari menyosialisasikan program unggulan terbarunya ini, masyarakat juga perlu diimbau memperbaiki gaya hidup sehatnya. Dengan program ini, Pemprov

DKI tidak sekedar mencari warga yang sakit, tapi juga sekaligus sebagai aksi tindakan preventif. “Dengan begitu, beban BPJS Kesehatan tidak besar di DKI Jakarta,” imbuh Okky lagi.

Seperti diketahui, Pemprov DKI mulai mencanangkan program ini dengan mendatangi lima rumah susun di Jakarta. Tujuannya, tidak sekedar mengobati pasien, tapi juga menemukan kasus-kasus penyakit yang diderita warga. Penderita langsung akan mendapat pengobatan dan perawatan.

“Untuk para petugas ‘ketuk pintu’ harus dibekali pelatihan terlebih dahulu mengenai upaya-upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Bila pendataannya baik, dapat dijadikan gambaran indeks kesehatan warga DKI Jakarta. Jadi, bisa dilakukan map-



Anggota Komisi IX DPR Okky Asokawati

ping bagi penyakit-penyakit tertentu seperti demam berdarah dan HIV, sehingga terapi dan metode pelayanan kesehatannya tepat sasaran,” katanya menutup perbincangan. (mh) foto: naefuroji/parle/hr

Perhutani Harus Hidupkan Industri Kecil



Anggota Komisi VI DPR Endang Srikarti Handayani

Perum Perhutani dihimbau untuk kembali menghidupkan sentra-sentra industri kecil terutama industri mebel dengan pendampingan yang masif. Lahan-lahan tidur yang selama ini belum termanfaatkan harus dihidupkan dengan mengajak masyarakat sekitar hutan untuk berperan.

Demikian disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI Endang Srikarti Handayani (dapil Jateng V), Senin (25/5). Menurut Endang, di Jawa Tengah (Jateng), masih banyak lahan tidur yang bisa dimanfaatkan untuk argoindustri. “Selama ini lahan tidur di Jateng tidak termanfaatkan, sehingga kita himbau untuk dihidupkan supaya memberi banyak manfaat bagi masyarakat. Jangan dibiarkan lahan tidur begitu saja. Itu harus bermanfaat untuk industri-industri kecil.”

Di Jateng usaha mebel begitu banyak. Sementara usaha mebel, sambung Endang, sedang menurun. Di sinilah Perhutani punya tanggung jawab sosial kepada masyarakat, terutama membantu menghidupkan geliat permebelan di Jateng. “Sekarang mebel sedang anjlok. Bagaimana bisa memberi pendampingan, sementara Perhutani tidak melakukan aksi tanam dan tebang. Semangatnya kurang,” nilai Endang.

Ditambahkan politisi Partai Golkar itu, aksi sosial yang dilakukan Perhutani selama ini juga belum terlalu menonjol.

Aksi corporate social responsibility (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) oleh Perhutani belum konkrit. Anggaran bagi hasil produksi hutan kayu dan nonkayu hanya Rp12 miliar yang bisa dibagikan kepada masyarakat. Endang menilai jumlah tersebut masih terlalu kecil.

“Kalau yang disediakan Perhutani cuma Rp12 miliar, apa yang bisa diberikan bagi rakyat. Pelestarian lingkungan di tengah masyarakat selama ini juga belum ada. Ayo kita bersama-sama mensejahterakan rakyat. Saya duduk di sini untuk rakyat,” aku Endang lagi. Bila ada lahan milik Perhutani yang belum dimanfaatkan, hendaknya mengajak masyarakat setempat untuk ikut memanfaatkannya dengan baik.

“Lahan tidur bisa digunakan untuk pendampingan. Misalnya, lahan tersebut ditanami pohon jabon. Produksinya bisa dilakukan bersama-sama, agar mendapatkan income yang memadai bagi industri kecil,” tambah Endang. (mh) foto: iwan armanias/parle/hr

Persiapkan Sejak Dini Semua Moda Transportasi Hadapi Mudik

Anggota Komisi V DPR Fauzih Amro mengharapkan semua moda transportasi baik bandara, pelabuhan dan jalan raya harus dipersiapkan sejak dini menghadapi arus mudik lebaran tahun ini. Karena itu Komisi V dalam waktu dekat akan meninjau langsung titik sentral kemacetan seperti pelabuhan laut, bandara dan terminal.

“Kita berharap bantuan dari pemerintah, pengusaha dan pemangku kepentingan lainnya tetap bisa mengadakan mudik gratis,” kata Fauzih di sela-sela Rapat Paripurna DPR Selasa (26/5).

Dari sisi kesiapan armada, dia minta Kemenhub dan jajaran memaksimalkan tidak hanya kapal laut tetapi juga penambahan rute pesawat dan juga bus. Kemenhub diharapkan punya data yang jelas berapa jumlah pemudik tahun ini. “Harapan kita dengan bantuan kapal laut, bus dan rute penerbangan ditambah, akan mengurangi beberapa titik kemacetan arus mudik,” ungkap politisi Hanura ini.

Beberapa titik macet seperti Pantura, jalur Lintas Sumatera- Bali dan Indonesia Timur, akan menjadi pantauan Komisi V dan akan cek lokasi. Dia juga mengharapkan Menhub dan Kemen PU akan maksimalkan mudik ini sehingga para pemudik bisa terlayani dengan sebaik-baiknya.

Soal tiket KA yang jauh-jauh hari sebelum Hari Raya sudah habis, Fauzih Amro mengatakan persoalan tiket itu klasik dan berharap nanti ada kebijakan pemerintah untuk menambah gerbong. Meski hari ini telah habis tetapi nanti H-10 atau H-7 ada gerbong tambahan.

Yang penting lanjut Fauzih, jangan sampai ada permainan calo di ketiga moda angkutan baik pesawat, KA maupun bus. “Kita berharap regulasi untuk hadapi mudik ini benar-benar ditaati oleh pemerintah dan operator. Kita berharap ada tambahan gerbong KA, bus dan ijin rute diperbanyak. UU 1/2009 mewajibkan pertanggal 30 Mei



Anggota Komisi V DPR Fauzih Amro

ini 1 perusahaan penerbangan harus miliki 10 pesawat 5 untuk dikuasai dan 5 dimiliki untukantisipasi menghadapi lebaran dan arus mudik,” kata Fauzih menambahkan. (mp) foto: odji/parle/hr

Pasar Tradisional Bisa Jadi Tempat Promosi Pariwisata

Pasar tradisional harus diproyeksikan menjadi wahana promosi pariwisata. Artinya, produk-produk khas daerah berupa hasil pertanian dan souvenir harus dipasarkan secara masif di pasar tradisional. Ini memudahkan indentifikasi pasar dan kekhasan daerah.

Anggota Komisi VI DPR RI Melani Leimena Suharli (dapil Jakarta II) menyatakan hal tersebut kepada Parlemen di ruang kerjanya, Senin (25/5). Pasar tradisional kelak tidak boleh kumuh, berbau, dan becek yang membuat para konsumen enggan berbelanja ke pasar tradisional. Untuk itu, revitalisasi pasar sangat penting untuk menata kembali pasar tradisional agar tak tergerus oleh keberadaan pasar modern yang kian tumbuh subur di daerah.

“Revitalisasi sangat penting di tengah membanjirnya pasar modern. Padahal, pasar tradisional justru membantu rakyat kecil untuk mendapatkan harga yang murah. Tapi, dengan perkembangan zaman, masyarakat kini melihat pasar tradisional bukan hanya tempat belanja, tapi juga melihat kenyamanannya. Itu yang ditawarkan oleh pasar modern. Pasar tradisional kesannya kumuh, becek, dan bau. Jadi, masyarakat malas pergi ke pasar tradisional,” kata Melani.

Politisi Partai Demokrat itu mengkhawatirkan, pasar tradisional akan ditinggalkan para konsumennya bila tak



Anggota Komisi VI DPR Melani Leimena Suharli

segera dibenahi. Seperti diketahui, anggaran revitalisasi dan pembangunan pasar tradisional sudah cair dari APBN sebesar Rp2 triliun. Dan pemerintah ingin segera merevitalisasinya. Menurut Melani, rencana revitalisasi itu harus mendata ter-



lebih dahulu pasar yang akan dibangun dengan melihat populasi penduduk setempat.

“Jangan sampai sudah dibangun pasar yang besar, ternyata tidak ada pedagang dan pengunjungnya yang datang. Itu, kan, jadi mubazir. Harus didata berapa banyak masyarakat yang tinggal di daerah setempat dan dibuat seberapa besar pasarnya. Jangan seperti di Papua sudah dibangun pasar yang begitu besar tapi kosong. Jadi anggaran pembangunan pasar jangan diserahkan ke Pemda begitu saja” ungkap mantan Wakil Ketua MPR RI itu.

Daerah yang belum punya pasar, lanjut Melani, harus diutamakan. Termasuk daerah yang akses ke pasar tradisional terlalu jauh dari jangkauan masyarakat. Membangun infrastruktur menuju pasar tradisional juga menjadi keharusan untuk segera dibangun, agar masyarakat mudah mengakses pasar.

Sementara sebagai wahana promosi pariwisata, pasar tradisional menjadi tempat bagi wisatawan untuk mencari kekhasan produk pertanian dan souvenir. Mencari souvenir khas daerah tidak harus ke toko-toko, tapi bisa juga dicari di pasar tradisional. Begitu juga

buah-buahan dan sayuran khas daerah setempat harus selalu ada di pasar tradisional, agar wisatawan mudah mencarinya dengan harga yang murah.

“Pasar-pasar tradisional harus memasarkan produk-produk lokal seperti buah dan sayuran. Misalnya, di Papua terkenal dengan buah merah. Nah, itu harus ada. Jadi orang yang datang ke Papua bisa mudah mendapatkan buah khas daerah, bukan buah impor. Buah lokal harus digalakkan sebagai kekhasan daerah,” harap Melani. (mh)

foto: rizka/parle/hr

Prajurit Wanita Berjilbab, Putusan Panglima TNI Bisa Jadi Pegangan

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tantowi Yahya menilai kebijakan Panglima TNI Jenderal Moeldoko yang memberikan kesempatan bagi prajurit TNI untuk mengenakan jilbab sebagai langkah tepat dan sesuai kondisi kekinian. Walaupun keputusan itu disampaikan secara lisan, hal tersebut sudah dapat dijadikan pegangan bagi semua pihak terutama prajurit wanita.

“Saya rasa putusan itu tepat waktu ya dan pernyataan lisan itu bisa dipegang dulu sampai diambil langkah selanjutnya. Hal ini bisa kita dalam rapat kerja dengan TNI dalam waktu dekat,” katanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (25/5/15).

Politisi Fraksi Partai Golkar ini meminta masyarakat bersabar menunggu langkah lebih lanjut seperti dukungan anggaran untuk pengadaan

jilbab yang seragam atau Surat Keputusan Panglima TNI menindaklanjuti pernyataan lisan yang disampaikan saat berkunjung ke Sumut.

Sebagaimana diketahui pernyataan panglima disampaikan menjawab pertanyaan Kapten Kes. Dastria yang meminta penjelasan tentang kemungkinan prajurit wanita TNI mengenakan jilbab seperti Polwan. Dihadapan prajurit dan hadirin yang berkumpul di hanggar Lanud Soewondo, Medan, Panglima TNI menjawab hal itu dengan lugas.

“Pakai saja, kita nggak melarang kok. Wanita TNI mau pakai jilbab, pakai saja. Kalau pakaian dinas memakai jilbab, memang kita pernah melarang? Nggak usah ribut. Itu urusan masing-masing,” tutur Moeldoko.

Pada kesempatan berbeda Wakil



Wakil Ketua Komisi I DPR Tantowi Yahya

Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengharapkan kebijakan Panglima TNI tersebut bisa ditindaklanjuti dengan menerbitkan surat keputusan. “Ini untuk mengatur agar jilbab yang dikenakan sesuai syariah dan tidak mengganggu prajurit wanita dalam melaksanakan tugasnya,” ujar dia. (iky)

foto: rizka/parle/hr

PT Freeport Harus Hijaukan Kembali Daerah Terkena Sirsat

Ketua Komisi VIII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, mendesak agar PT Freeport lebih bersungguh-sungguh memperhatikan ekosistem di wilayah pertambangan mereka. Penambangan yang masih terus berlanjut diharapkan tidak merusak lingkungan yang akhirnya menimbulkan bencana dan merugikan semua pihak.

“PT Freeport harus menghidupkan kembali daerah-daerah yang terkena sirsat (pasir sisa tambang). Usaha penghi-

jauan memang sudah dilakukan, tetapi tentu masih perlu ditingkatkan dan diintensifkan lagi. Apalagi, PT Freeport sudah beroperasi selama 48 tahun. Tentu banyak areal yang butuh perhatian dan penanganan agar ekosistem yang ada tidak terganggu,” demikian disampaikan Saleh ketika meninjau Mile 21, areal penghijauan PT Freeport, di Timika, Sabtu (23/05).

Dijelaskan Saleh, ikut menjaga kelestarian lingkungan



Tim kunjungan spesifik Komisi VIII DPR melakukan penanaman pohon di wilayah PT Freeport

adalah kewajiban PT Freeport yang tidak dapat ditawar-tawar. Karena itu, PT Freeport harus memiliki *master plan* penghijauan yang dikoordinasikan dan disetujui oleh pemerintah. Dengan begitu, beberapa tahun ke depan,

areal yang dilalui sirsat bisa dihijaukan kembali.

“Sebagai salah satu perusahaan pertambangan tertua di Indonesia, PT Freeport harus bisa menjadi contoh. Apalagi saat ini, ada banyak perusahaan pertambangan lain yang sedang beroperasi. Perusahaan-perusahaan pertambangan itu tentu akan menjadikan PT Freeport sebagai rujukan. Nah jika PT Freeport tidak bisa menunjukkan prestasi yang baik dalam menjaga lingkungan, dikhawatirkan yang lain juga akan mengikuti,” ujar Saleh.

Kerja keras PT Freeport dalam mengelola pertambangannya harus seimbang dengan kerja keras mereka dalam mengendalikan lingkungan dan mencegah terjadinya bencana. Dengan begitu, ada keseimbangan ekologis antara *nature* (alam) dan *culture* (kebudayaan).

“Pertambangan itu kan orientasinya membangun kebudayaan (*culture*). Membangun *culture* tentu tidak boleh merusak alam (*nature*). PT Freeport bisa mengatakan telah berupaya menjaga keseimbangan itu. Faktanya, menurut saya, belum cukup. Dari atas pesawat saja masih terlihat adanya aliran sirsat yang melintang lurus dari Tembagapura menuju muara,” pungkasnya. (Ayu) foto: ayu/parle/hr

Komisi I Kaji Pembukaan Kantor Perwakilan RI di Sudan Selatan



Wakil Ketua Komisi I DPR Tantowi Yahya

Komisi I DPR RI meminta masukan dari sejumlah akademisi/pakar hubungan internasional, khususnya yang memahami permasalahan tentang Republik Sudan Selatan. Masukan ini untuk melengkapi rekomendasi yang diminta pemerintah terkait rencana pembukaan Kantor Perwakilan RI di Sudan Selatan.

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I Tantowi Yahya, sejumlah anggota komisi yang membidangi

masalah luar negeri ini mengemukakan pandangannya. Ridwan Andi Wittiri dari Fraksi PDIP menilai potensi kerja sama dengan Sudan Selatan terutama dibidang energi memang menjanjikan namun ia mengkhawatirkan konflik berkepanjangan yang terjadi di negara ini.

“Potensi energi minyak bumi Sudan Selatan memang menjanjikan tetapi karena konflik di negara itu, saya sepaham pembangunan kantor perwakilan di sana akan sangat beresiko dan mahal. Cina saja yang *super power* belum bisa maksimal di sana,” tekannya.

Sementara itu anggota Komisi I dari Fraksi Partai Demokrat Salim Mengga mengingatkan konflik di Sudan ini embrionya sudah ada sejak era penjajahan Inggris. Mantan perwira tinggi TNI ini memperkirakan pertikaian belum akan selesai dalam waktu dekat.

“Konflik di sana benuasa etnis dan agama, apalagi tidak ada suku yang mayoritas hampir sama besarnya. Jadi perkiraannya tidak akan selesai dalam waktu dekat sehingga terlalu beresiko kalau pemerintah berniat membuka kantor perwakilan sekarang,” tuturnya.

Hadir dalam RDPU tiga orang pa-

kar yaitu Iis Gindarsa dan Phillip J Vermonte dari Lembaga Studi CSIS serta Shofwan Al Banna Choiruzzad akademisi dari Universitas Indonesia. Ketiga pembicara sepakat Pemerintah Indonesia patut membuka kantor perwakilan di Sudan Selatan karena termasuk negara yang telah memberikan dukungan terbentuknya Republik Sudan Selatan tahun 2011 lalu.

“Kantor Perwakilan di Sudan Selatan perlu kita buka, tapi yang harus kita pertanyakan adalah kapan waktu yang tepat. Kita punya aset yang perlu dilindungi yaitu Pertamina dan Medco yang sudah beroperasi tapi patut dipastikan pembukaan kantor itu tidak membuat terganggunya netralitas Indonesia dalam konflik yang melibatkan presiden dan mantan wakil presiden negara itu,” demikian Gindarsa.

Republik Sudan Selatan terbentuk setelah melewati proses referendum yang didukung 90 persen penduduknya. Tahun 2013 lalu terjadi konflik yang melibatkan dua suku besar, mengakibatkan lebih dari 10 ribu penduduk tewas dan 1,3 juta orang mengungsi. (iky) foto: iwan armanias/parle/hr



Asrama Taruna Papua Diharapkan Tekankan Nasionalisme

Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanul Haq berharap pendidikan dan pelatihan yang diajarkan di Asrama Taruna Papua di Kelurahan Wonosari Jaya-SP4 Distrik Wania Papua lebih menekankan pada nasionalisme.

“Saya mengapresiasi adanya asrama anak ini sebagai salah satu bentuk CSR dari PT Freeport namun disini saya melihat ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Salah satunya merubah pola didik anak yang tidak hanya mencontohkan impian untuk menjadi rohaniawan saja, misalnya anak selalu diarahkan menjadi pendeta. Padahal banyak profesi mulia lainnya yang bisa ditularkan kepada anak-anak untuk membangun tanah Papua dan Indonesia pada umumnya,” ungkap Maman saat mengunjungi asrama Taruna Papua, Jumat (22/5) sore.

Maman berharap anak-anak Papua juga dididik untuk memiliki jiwa nasionalisme atau rasa cinta pada tanah air Indonesia. Misalnya dengan mengajarkan lagu-lagu kebangsaan dan sebagainya. Karena meski keberadaan asrama itu merupakan bagian dari CSR yang dilakukan PT Freeport namun hal itu dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan regulasi yang dibentuk oleh negara Indonesia.

Tidak hanya itu, menurut Politisi dari Fraksi PKB ini, anak-anak di asrama tersebut terdiri dibawa dari pelosok suku



Tim kunjungan spesifik Komisi VIII DPR saat bermain dengan anak-anak Papua

dan dusun-dusun terpencil dengan usia yang bervariasi, tentu untuk diarahkan. Ia berharap agar pola didik atau pengajaran anak disesuaikan dengan usia anak.

“Saya melihat walaupun kamarnya berbeda-beda tapi saya lihat mereka ditempatkan dalam satu lingkungan asrama yang sama tanpa ada sekat pemisah. Saya khawatir kondisi ini akan membuat anak mendapat atau mencontoh perilaku yang tidak sesuai usianya,” papar Maman. (Ayu) foto: ayu/parle/hr

Komisi VIII Dorong CSR PT Freeport Indonesia



Tim kunjungan spesifik Komisi VIII DPR foto bersama di IPN

Komisi VIII Mengapresiasi didirikannya IPN (Institut Pertambangan Nemangkawi) sebagai salah satu bentuk CSR (*corporate social responsibility*) PT Freeport Indonesia. Namun masih ada beberapa hal yang harus perlu didorong dari lembaga pelatihan kerja tersebut. Hal tersebut terungkap saat Tim kunjungan spesifik Komisi VIII mengunjungi IPN di Mimika, Papua Jumat (22/5).

Dikatakan Ketua Komisi VIII, Saleh Partaonan Daulay sebagaimana penjelasan dari Lasmaydha Siregar, *Executive Vice President* PT FI, sejak didirikannya 12 tahun yang lalu IPN memang telah mengalami penambahan jurusan pelatihan, dari 3 menjadi 22 jurusan diantaranya. Jurusan administrasi dan teknik yang kesemua itu disesuaikan dengan kebutuhan PT Freeport.

Padahal lulusan IPN tidak serta merta bisa langsung bekerja di perusahaan tersebut alias harus menunggu posisi yang kosong. Seharusnya saat menunggu itu lulusan IPN bisa bekerja di perusahaan lain. Sehingga sejatinya

jurusan yang ada di IPN ini tidak hanya didasarkan pada kebutuhan freeport saja, melainkan memang kebutuhan profesi di industri kerja tanah air. Sebut saja jurusan sekertaris yang tidak hanya berkaitan dengan pertambangan.

“Selain itu kami juga mendorong agar

sertifikat sebagai penanda kelulusan IPN ini tidak hanya sebatas sertifikat internal saja. Melainkan juga ijazah dari negara. Pemerintah harus mengakui skill atau keahlian dari lulusan IPN,” jelas Saleh.

Pada kesempatan itu IPN menyam-

but baik atas masukan dan dorongan dari Komisi VIII, bahkan pada 2016 mendatang pihaknya berencana akan mendaftarkan akreditasi IPN sebagai lembaga latihan kerja. (Ayu) foto: ayu/parle/hr

RUU Arsitek Atur Profesionalisme dan Integritas Profesi Arsitek



Ketua Komisi V DPR Fahri Djemi Francis saat diwawancara wartawan

Ketua Komisi V DPR Fahri Djemi Francis mengatakan, RUU Arsitek nantinya akan mengatur mengenai profesionalisme dan integritas profesi, perlindungan profesi arsitek dan ketentuan sanksi pada bidang arsitek ini.

“Prinsipnya seorang arsitek harus berpegang pada etika profesi, memahami dan menguasai permasalahan desain arsitek khususnya pemahaman ekonomi bangunan, sehingga tidak terjebak hanya sebagai pelayan desain yang menuruti saja kemauan pemberi order untuk merancang arsitek yang tidak sesuai dengan moral,” jelasnya dalam sambutannya saat Kunjungan Kerja RUU Arsitek dalam rangka menerima masukan terkait RUU Arsitek di Provinsi Yogyakarta, baru-baru ini.

Dalam rangka itu, jelasnya, RUU Arsitek bukan lagi pada tataran kelengkapan penyediaan tatanan hukum namun sudah merupakan kebutuhan mendesak yang harus segera diselesaikan.

“Saat ini memang belum ada pola keseragaman yang dituangkan dalam suatu pengaturan yang bersifat komprehensif mencakup tentang arsitek,

syarat pengangkatan arsitek hak dan kewajiban arsitek, standar arsitek perlindungan hasil karya arsitek, penyelenggaraan praktik arsitek, pengembangan keprofesian berkelanjutan, registrasi dan sertifikasi profesi arsitek, serta keberadaan arsitek asing sehingga berkontribusi kepada kurangnya perlindungan terhadap arsitek serta hasil karyanya,” jelasnya.

Menurutnya, lemahnya daya saing dan kompetensi arsitek nasional dalam menghadapi era pasar bebas dan masyarakat ekonomi ASEAN sehingga perlu segera ditingkatkan sesuai dengan standar yang berlaku. “Masih belum ada cetak biru yang menggambarkan khasanah literatur budaya arsitek Indonesia yang demikian beragam sehingga ciri orisinalitas budaya arsitek Indonesia belum mendapatkan pengakuan dalam tataran global,” ujarnya. (si) foto: rizka/parle/hr

Program KSB Patut Dicontoh Daerah Lain

Dalam rangka memperkuat kesiapsiagaan penanggulangan bencana berbasis masyarakat, pemerintah dalam hal ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Sosial memiliki program unggulan Desa Tangguh dan Kampung Siaga Bencana (KSB). KSB ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri yang patut dicontoh daerah lain.

“Ini merupakan aset dan jati diri bangsa Indonesia sebenarnya, yakni masyarakat yang tidak bferikir untuk diri sendiri serta memiliki rasa tolong-menolong yang tinggi,” ungkap Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII, Ledia Hanifa Amaliah kepada wartawan di sela-sela saat peninjauan ke Desa Umbulharjo, Cangkringan, Kabupaten



Tim kunjungan spesifik Komisi VIII DPR mengunjungi Kampung Siaga Bencana di Yogyakarta

Sleman sebagai KSB, Kamis (21/5/2015).

Komisi VIII yang membidangi Sosial dan BNPB melihat langsung KSB Sleman karena melihat persoalan-persoalan bencana di Yogyakarta ini bukan persoalan sederhana.

“Alhamdulillah apa yang kita lihat di KSB Sleman itu sudah mulai bangkit. Banyak hal yang bisa dilakukan dan terobosan-terobosan baru, misalnya terobosan dalam konteks ini bisa menjadikan vulkanotur. Itu jadi satu hal yang positif, artinya memberikan dorongan kepada warga,” jelas Ledia.

Politisi PKS ini mengingatkan, yang perlu diantisipasi karena sudah menjadi turisme, persoalannya adalah kalau ada bencana sementara turis sedang banyak sehingga perlu ada sosialisasi tentang jalan evakuasi agar nantinya tidak memakan korban yang lebih banyak lagi.

“Jadi sosialisasi evakuasi penting dan perlu secara rutin untuk melakukan latihan evakuasi,” tegasnya.

Ia berharap agar pemerintah mampu merancang program jemput bola sehingga kejadian-kejadian yang tidak diharapkan dapat dielemenir semaksimal mungkin. “Semoga

pelaksanaan KSB ini benar-benar akan senafas dengan apa-apa yang menjadi kebutuhan warga bangsa secara keseluruhan,” harapnya.

Kepala Dinas Sosial DIY, Untung Sukaryadi menjelaskan maksud penyelenggaraan KSB ini adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari resiko dan ancaman bencana. Caranya dengan menyelenggarakan kegiatan penanggulangan bencana berbasis masyarakat dengan memanfaatkan sumberdaya alam dan manusia yang ada pada lingkungan setempat.

Dengan dibentuknya KSB, Untung berharap masyarakat yang bertempat tinggal di daerah rawan bencana dapat proaktif dan sesegera mungkin melakukan penanggulangan terhadap dampak yang diakibatkan bencana secara mandiri. *(iw) foto: iwan armanias/parle/hr*

Gubernur Kalteng Usulkan RUU Arsitek Perhatikan Budaya Lokal

Gubernur Kalteng Teras Narang yang didampingi Kepala Dinas PU Provinsi dan Kab/Kota, Civitas Akademika; Univ. Negeri Palangkaraya, Univ. Kristen Palangkaraya, Univ. Muhammadiyah dan Ikatan Arsitek Daerah, mengusulkan supaya dalam Rancangan Undang-undang Arsitek dapat memperhatikan keberadaan budaya dan Kultur daerah setempat. Hal tersebut disampaikan pada saat pertemuan dengan Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI dalam rangka Fokus Group Discussion (FGD) di Aula Eka Hapakat Lantai 3 Kantor Gubernur Kalimantan Tengah. Jumát (22/05).

Kunjungan Komisi V DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi/Ketua Tim Kunker Lasarus didampingi 7 orang anggota Dewan, antara lain; Novita Wijayanti, Dalim Fakhri, Pdt. Elin Numberi, Willem Wandik, Jazilul Fawaid, Wardatul Asriah dan Sahat Silaban bertujuan untuk mendengarkan masukan-masukan dan menampung aspirasi tentang RUU Arsitek.

“Pentingnya sebelum Undang-Undang ini ditetapkan perlu mendengarkan aspirasi dari daerah serta mengakomodir hal-hal yang terkait dengan perkembangan arsitek untuk bahan dalam penyusunan UU Arsitek. Seni Arsitek dipandang dapat membantu mempertahankan kebudayaan dan kultur suatu daerah,” kata Teras.

Selanjutnya Teras mengatakan, bagi para arsitek diperlukan adanya payung hukum yang jelas terkait masalah kedudukan, peran serta tanggungja-



Tim kunjungan Komisi V DPR saat berdialog dengan Gubernur Kalteng Teras Narang

wab yang harus dipenuhi oleh seorang arsitek. Keberadaan RUU yang dibahas, menurut Gubernur sudah komprehensif, namun tetap membutuhkan dari semua pihak.

“Di sisi lain perlu menggali hal hal tradisional dalam membuat sebuah RUU arsitek ini misalnya menyangkut identitas kebudayaan local serta kultur negara secara umum dimana para arsitek akan membuat rancangan,” jelas Teras.

Sedangkan Lasarus menyampaikan bahwa kegiatan Komisi V DPR RI ini untuk mendengarkan dan menampung aspirasi dari daerah terkait dengan penyusunan RUU Arsitek.

Lebih lanjut Lasarus mengatakan, bahwa Komisi V juga sudah menyusun draft akademik yang diharapkan dapat menjadi point penting yang nantinya dimasukan dengan usulan berbagai daerah.

Disamping itu, keragaman budaya di Indonesia yang begitu aneka ragam belum memiliki UU mengenai profesi arsitek, padahal dipandang profesi arsitek cukup penting dalam menjaga kelestarian budaya khusus terkait pola dan rancang bangun nuansa etnik dan keragaman budaya nasional, ungkap Lasarus. *(hr) foto: eka hindra/parle/hr*

Data BPS NTT Tidak Akurat

Komisi XI DPR RI menduga bahwa data-data dari Kantor Perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), baik data kemiskinan makro maupun kemiskinan mikro itu tidak akurat.

Data kemiskinan NTT sebesar 1 juta orang akan tetapi angkatan kerjanya 75% terdiri lulusan SD dan SMP, jadi banyak yang paradoks. “Kita ingin memastikan data itu akurat sehingga program bantuan sosial dari pemerintah pusat itu bisa sampai kepada rakyat yang benar-benar membutuhkan,” ujar anggota Komisi XI DPR Johnny G. Plate di sela-sela kunker ke NTT baru-baru ini.

Menurut politisi Partai Nasdem ini, validitas data yang dikirim ke pemerintah pusat terkait kondisi daerah sangat berpengaruh dalam pengambilan kebijakan di tingkat pusat. Karena itu, Pemda diimbau untuk tidak melakukan penipuan berkaitan dengan data riil.

Dikatakan, kebijakan publik yang diambil di tingkat pusat melalui postur

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), didasari validitas data yang dikirim masing-masing daerah. Mestinya ada kebijakan ekstra yang ditempuh untuk meningkatkan *income* perkapita masyarakat. Karena itu, kebijakan pemerintah di daerah hanya bisa dilakukan berdasarkan data yang akurat.

“Jika terjadi kesalahan data, akan berdampak terhadap kebijakan negara, dan juga perekonomian masyarakat di desa,” jelas Johnny.

Dalam konteks itu, lanjutnya, data yang akurat dan *valid* harus menjadi bagian integral dalam perumusan kebijakan di daerah. Untuk mendapat perhatian pemerintah pusat, dalam kaitan dengan anggaran, tidak perlu mempraktikkan uang beli uang, tapi program yang ditawarkan harus didasarkan kepada data yang akurat dan *valid*.

“Banyak kendala-kendala pengumpulan data, bahkan di Kota Kupang ini sendiri data yang ada tidak betul dan



Anggota Komisi XI DPR Johnny G. Plate

itu diakui sendiri oleh BPS,” tukas dia.

Kepala Kantor Perwakilan BPS Provinsi NTT, Sofan mengakui akhir-akhir ini partisipasi masyarakat pemberi data cenderung menurun. Oleh karena itu, pihaknya mengharapkan dukungan Komisi XI DPR RI apabila bertemu masyarakat agar mereka mau mendukung BPS dengan memberikan data. “Karena data yang disampaikan BPS adalah hasil jawaban masyarakat,” ungkapnya. (iw) /foto : iwan armanias/parle/iw.

Masyarakat Terlalu Mendewakan Gelar



Wakil Ketua Komisi X DPR M. Sohibul Iman (tengah), Chusnul Mar'iyah (kiri), Musni Umar (tiga dari kiri), dan Murdjani (kanan) saat diskusi

Wakil Ketua Komisi X DPR M. Sohibul Iman menjelaskan, maraknya ijazah atau gelar palsu selama ini akibat masyarakat mendewakan gelar dan bukannya ilmu pengetahuan. Karena

itu ke depan orientasi pendidikan khususnya pendidikan tinggi bangsa ini harus untuk ilmu pengetahuan dan bukan semata mengejar gelar. Ditambah lagi UU No.12 tahun 2012

tentang pendidikan tinggi (PT) membuka peluang terjadinya liberalisasi pendidikan termasuk bagi asing, maka inilah antara lain yang harus diperbaiki oleh pemerintah bersama DPR RI secara sungguh-sungguh.

“Saya berharap Menristek M. Nasir serius menuntaskan masalah ijazah palsu ini, karena pendidikan merupakan pondasi untuk membentuk bangsa dan masyarakat yang beradab. Sebab, yang namanya akademisi itu seharusnya ada kekhususan (*lex specialist*) di mana peneliti dan akademisi itu tidak terikat jam belajar, karena yang terpenting adalah *output*-nya,” tegas Sohibul Iman dalam dialektika demokrasi bertajuk ‘Ijazah palsu mencederai dunia akademik’ bersama pengajar UIN Syahid Jakarta, Prof. Musni Umar PhD, dan pengajar UI Dr. Chusnul Mar'iyah di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (28/5).

Menurut Politisi PKS ini, pemalsuan ijazah bukan saja terkait penegakan aturan, tapi menyangkut budaya di mana sudah terjadi salah pandang masyarakat terhadap gelar atau *title* yang telah dijadikan status sosial untuk mendapatkan apa saja yang diinginkan

dengan gelar tersebut. “Itulah yang mengakibatkan terjadinya jalan pintas untuk memperoleh gelar,” ujarnya.

Karena itu, cara-pandang (*mindset*) masyarakat itu kata Sohibul, harus dirubah agar tidak gila gelar dan tidak mendewakan status sosial.

Selain itu, Sohibul meminta pemerintah menghentikan liberalisasi pendidikan karena dampak negatifnya sangat besar, disamping harus mengkaji aturan-aturan internasional yang kita lemah dalam hal ini, meski ada hal-hal yang kalau diliberalisasi justru Indonesia beruntung.

Sejauh itu kata Sohibul, ijazah palsu itu terjadi setidaknya dengan tiga cara; pertama, melakukan pemalsuan kop surat, stempel dan atas nama sebuah universitas tertentu.

Kedua, lembaga pendidikan berhak menggelar belajar-mengajar tapi belum berhak mengeluarkan ijazah karena belum mendapat akreditasi, dan ketiga, lembaga pendidikan tinggi ada, memiliki gedung, tapi tidak ada kegiatan belajar-mengajar. “Yang ter-

akhir inilah yang banyak kasus sekarang ini,” tambahnya.

Chusnul Mar’iyah menilai sekarang ini doktor itu menjadi produk massal dengan menjadikan bawahannya sebagai tim, selanjutnya tim yang menulis, dan gelarnya untuk bos itu. Padahal doktor itu harus membaca buku yang aseli bukan melalui internet, wikipedia dan dunia maya lainnya. “Jadi, kasus ini menjadi *warning* untuk pejabat yang mengejar gelar tapi tidak menulis sendiri. Ini cara kerja yang salah,” tutur Chusnul.

Dia mendukung revisi UU No.12 tahun 2012 tersebut, karena dampak negatif liberalisasi itu sangat besar, sehingga asing bisa membuka perguruan tinggi di Indonesia. “Liberalisasi ini akibat negara belum mampu menggelar pendidikan, sehingga banyak yang mengambil jalan pintas, maka UU PT itu perlu dikaji. Apalagi tugas utama negara adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,” katanya.

Kalau tidak direvisi menurut Chusnul, maka akan banyak kasus seperti

Jakarta International School (JIS), Universitas Berkeley dan sebagainya, maka dalam UU itu perlu ada proteksi untuk menghindari berbagai kasus liberalisasi tersebut, mengingat negara Pancasila adalah untuk mencerdaskan bangsa. “Pendidikan itu penting karena akan menjadi simbol peradaban bangsa ini,” pungkasnya.

Musni Umar menilai jika ijazah palsu itu terkait dengan budaya bangsa di mana gelar itu dianggap sangat penting, sehingga simbol-simbol itu digunakan untuk memperoleh kehormatan dari masyarakat. “Kasus ini diantaranya akibat kegagalan elit yang tidak memberi pendidikan kepada rakyat. Mereka mengejar gelar magister dan doktor dengan menghalalkan segala cara, maka ini contoh buruk pejabat kepada rakyat. Padahal, yang namanya belajar itu membutuhkan keseriusan dan belajar bertahun-tahun. Jadi, Menristek harus tuntaskan ijazah palsu ini, tidak hanya ramai membicarakan lalu hilang begitu saja,” tambahnya.(nt)

foto andri/parle/hr

Komisi VII DPR Janji Revisi UU Migas



Wakil Ketua Komisi VII DPR Mulyadi dan Anggota Komisi VII Kurtubi dalam acara Dialektika Demokrasi

Panja Migas Komisi VII DPR RI janji akan merevisi UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas yang masih membolehkan Pertamina mengimpor BBM melalui pihak ketiga, trader atau mafia. Revisi dilakukan agar Pertamina bisa mengimpor langsung dari produsen. Karena itu meski Petral dibubarkan dan diganti dengan *Integrated Supply Chain* (ISC), kalau impor BBM tetap melalui pihak ketiga, maka pembubaran Petral itu tidak akan berpengaruh terhadap harga BBM yang terus naik.

“Jadi, tidak benar kalau DPR RI membiarkan kebijakan pemerintah yang menyerahkan harga BBM ke pasar dunia. Bahwa Komisi VII DPR sudah mengingatkan agar tidak membuat kebijakan pro pasar karena melanggar konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi (MK) sudah membatalkan menyerahkan harga ke mekanisme pasar dunia itu, tapi pemerintah tetap saja berjalan,” tegas Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Mulyadi (F-PD) dalam dialektika demokrasi “Pembubaran Petral” bersama anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi (F-Nasdem) di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (21/05/2015).

Bahayanya kata Mulyadi, harga premium sekarang ini tidak disubsidi lagi oleh pemerintah, tapi ketika harga BBM dunia naik, pemerintah meminjam uang dari Pertamina. Karena itu persoalan BBM itu kini makin kompleks dan rumit. Apalagi sistem *cost recovery* meski Indonesia mendapatkan 80%, tapi setelah dikurangi biaya produksi, perawatan, dan lain-lainnya keuntungannya ternyata kurang dari 30%. “Untuk itulah perlunya revisi UU Migas ini,” ujarnya.

Kenapa tetap impor melalui pihak ketiga? Menurut Mulyadi, bagaimana pun yang namanya anak perusahaan itu tetap mencari untung termasuk Petral sebagai anak perusahaan Pertamina. Padahal kalau bisa impor langsung atau *national oil company* (NOC) biayanya akan lebih murah dibanding melalui trader. “Jadi, kalau pembubaran Petral tapi tetap impor melalui trader, maka pembubaran itu hanya sebagai pencitraan. Petral bubar, namun muncul ISC, itu sama saja ganti *casing* atau tikusnya hanya pindah ke rumah yang baru,” tambahnya.

Sebelumnya kata Mulyadi, Menteri ESDM Sudirman Said

sendiri menolak membubarkan Petral ketika Komisi VII DPR mengusulkan, karena akan dikembangkan untuk kerjasama dengan Petronas Malaysia, tapi sekarang tiba-tiba dibubarkan, ada apa? “Sama halnya dengan kontrak Migas dengan Sonangol, Nigeria, yang semula antara pemerintah dengan pemerintah, kini malah *business to business* (b to b). Lalu mana penghematan Rp 72 triliun yang dijanjikan?” tanya Mulyadi.

Menurut Kurtubi, dengan membubarkan Petral maka proses impor Migas akan makin efektif dan mampu menghemat 22 juta dollar AS, meski ISC sebagai pihak ketiga yang mengimpor karena UU Migas masih memerintahkan demikian. “Pertamina memang bisa impor langsung dari produsen tapi itu butuh waktu lama dan UU Migas mesti direvisi terlebih dahulu. Memahami harga dan Migas itu cukup melihat di kilang itu sendiri, semua data tentang Migas lengkap, dan yang penting tidak melalui pihak ketiga,” tutur politisi asal NTB ini.

Kenapa harga BBM terus naik, hal itu kata Kurtubi, karena hampir 100 % Migas kita semua impor, bahkan kita selamalamanya akan menjadi importir, kalau tidak merevisi UU Migas tersebut. Padahal Indonesia bisa menjadi produsen Migas dengan sumber migas yang ada memiliki kandungan Migas sekitar 80 miliar barel baik di laut maupun di darat dengan 120 cekungan. “Itu akan menjadi cadangan Migas

yang baik kalau dieksplorasi,” jelasnya.

Kalau di Arab Saudi lanjut Kurtubi, persediaan Migasnya mencapai ribuan miliar barel, sehingga biaya produksinya hanya 5 dollar AS/barel dan Indonesia 20 dollar AS/barel. Sehingga harganya jauh lebih mahal. Apakah pemerintah melanggar UU? “Pemerintah hanya menentukan harga di SPBU, karena Migas 100 % impor sesuai harga acuan pasar dunia atau *Mean of Platts Singapore* (MOPS) Singapura, maka harganya terus naik,” ungkapnya.

Karena itu ke depan kalau mau adil, fair, dia mengusulkan sebanyak 60 % harga sesuai MOPS, tapi 40 % -nya disesuaikan dengan biaya pokok produksi dalam negeri. “Kalau seluruhnya diserahkan ke pasar, maka harga BBM itu setiap hari akan berubah. Di mana kalau harga dunia naik maka pemerintah akan defisit, dan sebaliknya kalau turun akan beruntung,” tambahnya.

Sedangkan mengenai mafia Migas, hal itu bisa dibuktikan dengan investigasi, misalnya bisa membuka dokumen impor dan Pertamina membayar ke siapa di situ bisa diketahui. “Kalau masalah Sonangol Afrika memang diawali oleh pemerintah atau g to g, agar ada kontrak suplai impor dalam jangka panjang,” pungkasnya. Namun ketika disinggung Surya Paloh dalam kontrak Migas di Sonangol tersebut, Kurtubi hanya tersenyum. (sc/nt) foto: andri/parle/hr

Sekjen DPR Lantik 7 Pejabat Eselon III dan IV



Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti melantik 7 Pejabat dilingkungan Setjen DPR

Untuk kepentingan dinas perlu segera mengangkat dan melantik serta memindahkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Setjen DPR untuk menempati jabatan baru. Hal seperti ini sudah merupakan sesuatu yang biasa terjadi di lingkungan Kesekjenan.

Demikian dikatakan Sekretaris Jenderal DPR Winantuningtyastiti Swasanani se usai melantik pejabat baru di ruang rapat Sekjen DPR Jum'at (22/4)

sore.

Win-panggilan akrab Sekjen DPR itu mengatakan, pengangkatan dan pemindahan pegawai negeri Sipil dalam jabatan administrator dan pengawas tersebut telah mendapat pertimbangan dari Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan).

Menurutnya, dinamika organisasi seperti ini sudah lazim di Sekretariat Jenderal DPR jika ada beberapa yang

kosong segera diisi oleh karyawan, serta ada juga yang promosi dari staf diangkat menjadi Kasubag.

Mereka yang dilantik adalah Endah Sri Lestari jabatan lama Kabag Set Baleg pindah jabatan baru sebagai Kabag Set. BURT, Widiyanto (Kasubag Rapat Bag. Set. Badan Legislasi) diangkat menjadi Kabag Set. Baleg, Erni Husniyati jabatan lama Kasubag Administrasi Perundang-Undangan Bag. Hukum dipindah sebagai Kasubag rapat Baleg.

Sementara itu Dahliya Bahnan staf Bag. Analisa Permasalahan Hukum Subag Pertimbangan dan Bantuan Hukum diangkat menjadi Kasubag Administrasi perundang-Undangan Bag. Hukum dan Saeful Anwar staf Organisasi Parlemen Subag Rapat Bag. Set. Kerjasama Bilateral diangkat menjadi Kasubag TU Set Kerjasama Bilateral.

Iis Muldiyanti staf Analisa Organisasi Parlemen diangkat menjadi Kasubag Rapat Bag. Set. Kerjasama Bilateral dan Intan Pujakesuma staf Pengadministrasian Umum Sekjen diangkat menjadi Kasubag TU Sekjen. (spy) foto: naefuroji/parle/hr

Tata Kelola Sistem Perbukuan di Indonesia Memprihatinkan



Anggota Komisi X DPR Popong Otje Djundjuran dalam acara Forum Legislasi

Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai Golkar Popong Otje Djundjuran menilai tata kelola sistem perbukuan di Indonesia sangat memprihatinkan. Salah satu faktor penyebabnya adalah penerbitan buku yang seolah tidak mendapatkan kontrol dari Pemerintah serta masyarakat.

“Makanya RUU Sistem Perbukuan ini harus segera diselesaikan karena sangat penting bagi perbukuan Indonesia agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang merugikan masyarakat,” kata Popong dalam diskusi Forum Legislasi bertajuk RUU Perbukuan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (26/5). Dalam forum itu, hadir pula Ketua IKAPI Jakarta, Afrizal Sinaro dan editor senior PT Gramedia, Irna Permanasari.

Menurut Popong, tak heran jika buku-buku yang beredar banyak melanggar etika, moral, lebih mengedepankan sisi komersil, dan tidak bertanggung-jawab terhadap isinya sehingga begitu saja memuat materi tidak layak dibaca oleh anak-anak seperti pornografi dan kriminalitas. Parahnya lagi, harga buku untuk pendidikan relatif mahal.

Politisi dari Partai Golkar itu optimistis RUU inisiatif DPR tersebut bisa selesai tahun ini, karena berdasarkan aturan pembahasannya tidak boleh lebih dari dua tahun.

Menurut dia, saat ini, RUU yang terdiri dari 19 bab dan 94 pasal tengah dibahas oleh Panja Perbukuan Komisi X DPR. Dalam rancangan peraturan ini, nantinya yang akan mengontrol perbukuan di Indonesia adalah Badan Perbukuan Indonesia.

Mengenai sanksi bagi pelanggaran yang dilakukan oleh penulis, penerbit, dan penjual buku, Popong mengungkapkan itu sudah diatur dalam RUU Sistem Perbukuan meski masih banyak kekurangan.

Sebagai inisiatif DPR, Panja Perbukuan Komisi X DPR, kata dia, mempersilahkan masyarakat menyampaikan aspirasinya soal perbukuan ini sampai diundangkan.

“Kita sekarang masih kalah dari India. Sebagai negara yang tergolong miskin, ternyata dalam soal perbukuan dan perpustakaan India sangat mewah. Begitu banyak buku yang tersedia. Bahkan harga buku untuk

anak-anak sekolah sangat murah, dan ditambah sekolah serta kesehatan juga gratis,” ujarnya.

Sementara itu, Editor Senior PT Gramedia, Irna Permanasari mengatakan draf RUU Perbukuan masih belum lengkap karena belum mengatur pelanggaran hak cipta, pajak berlipis bagi penulis, sanksi yang tegas bagi penerbit dan soal lain yang perlu diatur.

“Misalnya penerbit menerbitkan kembali bukunya tanpa sepengetahuan penulis, maka sanksinya pakai pasal apa? Juga jangan sampai RUU ini hanya untuk buku proyek,” katanya.

Sementara itu, Ketua IKAPI Jakarta, Afrizal Sinaro menilai RUU Sistem Perbukuan itu sangat diharapkan kehadirannya oleh penerbit, mengingat nasib penerbitan sekarang ini sangat memprihatinkan.

“Misalnya mencetak 3.000 eksemplar, ternyata satu tahun tidak habis. Belum lagi ada buku bajakan yang tiba-tiba beredar. Jadi, sebanyak 700 penerbit yang tergabung dalam IKAPI ini berharap RUU ini segera diundangkan,” harapnya. (nt/sc) foto: naefuroji/parle/hr



Ketua DPR RI Setya Novanto menerima Pimpinan BPKP di Gedung Nusantara III DPR RI Senayan, Senin (25/05) Foto: Andri/Parle/HR



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah kunjungi Ruang Redaksi Bagian Pemberitaan DPR, Rabu (27/05) Foto: Andri/Parle/HR



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dan Fahri Hamzah menerima dan melepas Forum Indonesia Untuk Syam dan secara simbolis menyerahkan sumbangan untuk pengungsi di Suriah, Kamis (28/05) Foto: Andri/Parle/HR



Suasana RDP Komisi III DPR RI dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terkait penyerapan anggaran APBNP 2014, Rabu (27/05) Foto: Andri/Parle/IW